

**UPAYA MENINGKATKAN PEMBINAAN SUMBER  
DAYA DALAM Mendukung OPERASI SEHINGGA  
DAPAT MEWUJUDKAN KETERPADUAN  
OPERASIONAL POLRI DALAM RANGKA MENCIPTA-  
KAN SITUASI KAMTIBMAS YANG MANTAP**

Oleh : Perwira Siswa Sespim Polri

Dikreg Ke-25/Praja Wira Wicaksana T.P. 1989/1990

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum**

a. Pelaksanaan tugas Polri dimasa yang akan datang semakin dihadapi pada hakekat ancaman Kamtibmas yang makin kompleks dan meningkat intensitasnya, sejalan dengan terjadinya kemajuan dibidang Ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

b. Tantangan tugas tersebut harus dapat dihadapi dan ditanggulangi oleh seluruh kekuatan Polri baik dibidang Operasional maupun dibidang pembinaan, dimana kedua bidang tersebut harus saling mendukung dan terpadu, sehingga dapat mencapai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas yang optimal.

c. Walaupun tugas Operasional mewarnai pelaksanaan tugas Polri, namun keberhasilan pelaksanaan tugas Operasional tersebut sangat ditentukan oleh tingkat kesiapsiagaan Operasional yang tinggi.

d. Untuk mencapai tingkat kesiap-

siagaan Operasional satuan Polri yang tinggi dalam sistim manajemen Polri, maka peranan manajemen sumber daya akan sangat mempengaruhi dalam mendukung pelaksanaan Operasional Polri dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang mantap.

e. Peranan pembinaan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian akan terjabar di dalam penyelenggaraan Sub Sistem pembinaan personil (juga meliputi pembinaan pendidikan dan latihan), Sub Sistem pembinaan logistik, Sub Sistem pembinaan anggaran dan Sub Sistem pembinaan informasi yang harus berjalan secara simultan dan selaras.

f. Memperhatikan kelemahan-kelemahan yang masih ditemui dalam penyelenggaraan pembinaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Operasional Polri, maka diperlukan upaya peningkatan pembinaan sumber daya yang meliputi Sub Sistem pembinaan personil, Sub Sistem pembinaan anggaran dan Sub Sistem pembinaan informasi.



## 2. Dasar

a. Petunjuk Pelaksanaan Nomor Pol. Julak/011/XI/1989, tanggal 13 Nopember 1989, tentang penyelenggaraan Diskusi II Pasis Sespim Polri ke-25/Praja Wira Wicaksana T.P. 1989/1990.

b. Lembar penugasan Nomor Pol. 28/XI/1989/B.Sdya tanggal 28 Nopember 1989, tentang Diskusi II Pasis Sespim Polri ke-25/Praja Wira Wicaksana T.P. 1989/1990.

c. Materi kuliah/ceramah bidang Pembinaan Sumber Daya, Strategi dan Manajemen Polri.

## 3. Maksud dan Tujuan

a. Makalah ini disusun untuk memenuhi penugasan yang diberikan lembaga, dalam rangka memenuhi kurikulum di bidang Diskusi II.

b. Dengan tujuan memberikan sumbangan pemikiran tentang pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri di bidang Operasional dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang mantap.

## 4. Permasalahan dan Persoalan

a. *Permasalahan.* Sesuai dengan judul makalah ini ditentukan permasalahan Bagaimana upaya meningkatkan pembinaan sumber daya dalam mendukung Operasi

sehingga dapat mewujudkan keterpaduan Operasional Polri dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang mantap ?

b. *Persoalan.* Berdasarkan permasalahan di atas ditetapkan persoalan sebagai berikut :

1) Bagaimana penyelenggaraan pembinaan sumber daya dewasa ini dalam mewujudkan keterpaduan Operasional Polri

2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi ?

3) Bagaimana penyelenggaraan pembinaan sumber daya yang diharapkan agar dapat mewujudkan keterpaduan Operasional Polri ?

4) Upaya apa yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pembinaan sumber daya ?

## 5. Metode dan Pendekatan

a. *Metode Penulisan.* Dalam penulisan makalah ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mengemukakan keadaan tentang keterangan atau bahan-bahan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan kemudian digambarkan, dibahas dan dianalisa dalam upaya mencari pemecahannya.

b. *Pendekatan.* Dalam pembahasan makalah ini menggunakan pendekatan manajemen dan pendekatan tugas, yaitu melihat



pelaksanaan tugas Polri di lapangan dalam melaksanakan pembinaan sumber daya.

## BAB II PENYELENGGARAAN PEM- BINAAN SUMBER DAYA DEWASA INI

### 6. Ruang Lingkup.

Makalah ini akan meliputi ruang lingkup :

a. Kondisi penyelenggaraan pembinaan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dibidang Operasional.

b. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan guna peningkatan penyelenggaraan pembinaan sumber daya ?

### 7. Tata Urut.

Untuk membahas makalah ini, akan disusun dengan tata urut :

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : PENYELENGGARAAN PEMBINAAN SUMBER DAYA DEWASA INI

c. BAB III : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

d. BAB IV : PENYELENGGARAAN PEMBINAAN SUMBER DAYA YANG DIHARAPKAN

e. BAB V : UPAYA MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN SUMBER DAYA

f. BAB VI : PENUTUP

### 8. Umum

a. Polri sebagai bagian integral dari ABRI, di dalam pengembangan kemampuan diarahkan kepada pembentukan kemampuan yang efektif dalam menghadapi berbagai ancaman gangguan Kamtibmas yaitu suatu kekuatan dengan jumlah yang cukup dengan kemampuan profesional yang dapat diandalkan.

b. Di dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, maka kegiatan pembinaan kekuatan selalu diarahkan untuk mendukung kegiatan penggunaan kekuatan, sehingga diharapkan dengan keterpaduan Binkuat dan Gunkuat, maka tugas pokok Polri dapat terlaksana secara optimal.

c. Pembinaan kekuatan Polri, adalah juga pembinaan sumber daya Polri, yang terdiri dari komponen-komponen Personil, Logistik, Keuangan dan Anggaran dan Sistem Informasi Polri, mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan Operasional Polri.

d. Penyelenggaraan pembinaan sumber daya dewasa ini, di dalam mendukung kegiatan Operasional Polri telah dilaksanakan walaupun dukungan yang diberikan belum

secara maksimal, karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu.

## 9. Bidang Personil

### a. Operasi Rutin (Optin)

#### 1) Tahap Perencanaan :

a) Rencana program kerja bidang Personil telah disusun mulai tingkat Polres sampai tingkat Mabes Polri, sesuai dengan penyusunan rencana program kerja Kesatuan.

b) Pejabat fungsional bidang Personil, telah terlihat dalam penyusunan perencanaan program kerja

c) Selanjutnya telah disusun Program Kerja, program kegiatan serta rencana kegiatan bidang Personil sesuai tingkat kesatuan masing-masing yang dikaitkan dengan aspek kuantitas dan aspek kualitas personil.

#### 2) Tahap pengorganisasian :

a) Telah dilakukan penempatan personil dengan pola TOA/TOD, serta kemampuan teknis Kepolisian/profesional Kepolisian guna memenuhi DSP/kebutuhan Operasional Rutin.

b) Telah dikeluarkan produk-produk/kebijaksanaan yang berkaitan dengan penempatan personil.

c) Telah dikeluarkan produk-produk fungsional bidang personil yang berkaitan dengan pembinaan personil.

### 3) Tahap pelaksanaan :

a) *Penerimaan personil.* Penerimaan personil diselenggarakan melalui prosedur seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan berdasarkan keputusan Kapolri atau Pangab. Kegiatan seleksi penerimaan diselenggarakan melalui ujian tingkat Polda dan tingkat pusat (untuk penerimaan Ba dan Ta).

#### b) Pendidikan dan Latihan.

(1) Pendidikan Polri berorientasi kebutuhan tugas Operasional untuk memperoleh hasil didik yang memiliki kualitas dan dedikasi yang memadai dalam mendukung Bangkuat Polri.

(2) Kurikulum pendidikan diarahkan kepada kebutuhan Operasional dan materi latihan perorangan yang bersifat asumptif.

(3) Tersedia sarana, prasarana pendidikan serta alins dan alon-gins guna mendukung terselenggaranya pendidikan.

(4) Upaya penyempurnaan pola pendidikan pada setiap Lembaga Pendidikan.

(5) Latihan perorangan diarahkan untuk memperoleh ketrampilan dalam upaya aplikasi pengetahuan di lapangan.

#### c) Pembinaan karier.

(1) Pembinaan karier per sonil diselenggarakan me nurut garis pengembangan jabatan dan kepangkatan.



(2) Pelaksanaan upaya pembinaan karier dengan pola pengembangan dan penempatan melalui jenjang penugasan sudah mulai dilaksanakan.

(3) Pembinaan karier diselenggarakan mengikuti prosedur dan metode yang berlaku dilingkungan Polri.

d) *Pola Penugasan.*

(1) Penugasan diselenggarakan menurut prosedur sesuai kewenangan dan pendelegasian wewenang pengangkatan dalam dan pemberhentian dalam jabatan.

(2) Penugasan personil disesuaikan dengan kebutuhan dan menurut jangka waktu tertentu dan merupakan *tour of duty* atau *tour of area*.

e) *Pola jabatan.*

(1) Pola jabatan disusun berdasarkan analisa jabatan yang diperlukan dalam rangka pengisian organisasi.

(2) Pola jabatan menggambarkan urutan-urutan jabatan yang mungkin dilalui oleh personil dalam rangka pengembangan karier.

(3) Pola jabatan disesuaikan pula dengan jalur pendidikan yang telah diikuti.

f) *Pola kepangkatan.*

(1) Pola kepangkatan Polri meliputi daftar urutan kepangkatan dan jabatan serta prosedur dan persyaratan kenaikan pangkat.

(2) Prosedur dan persyaratan kenaikan pangkat Polri diatur berdasarkan prinsip selektivitas sesuai dengan norma-norma kenaikan pangkat personil ABRI/ Polri.

g) *Perawatan.*

(1) *Perawatan mental dan kehidupan kerokhanian.*

(a) Pembinaan mental dilaksanakan untuk memelihara sikap mental/jiwa kejuangan dan profesional serta perilaku hidup personil Polri sebagai insan prajurit Sapta Marga yang menghayati dan mengamalkan Tribrata dan Catur Prasetya.

(b) Pembinaan kehidupan kerokhanian bertujuan untuk memupuk personil Polri sebagai insan Hamba Tuhan yang Pancasila.

(2) *Perawatan Jasmani dan Kesehatan.* Dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang terpeliharanya kemampuan fisik dan psikis personil Polri.

h) *Pengakhiran dinas.* Pengakhiran dinas personil Polri diselenggarakan setelah ada keputusan dari yang berwenang berbentuk :

(1) Pemberian masa persiapan pensiun (MPP) dan perpanjangan dinas aktif (PDA).

(2) Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan.

(3) Pemberhentian tidak dengan hormat.



#### 4) Tahap pengendalian.

- a) Telah di laksanakan laporan periodik pembinaan personil, sesuai tingkat kesatuan.
- b) Telah dilaksanakan tindakan koreksi/perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan, di semua tingkat kesatuan.

#### b. Operasi Khusus Kepolisian

##### 1) Tahap perencanaan.

a) Telah dibuat rencana fungsi (Renbanminlog) sebagai lampiran Renops sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/187/IV/1989 tentang komponen Operasional Polri.

b) Bila pejabat fungsional Binpers dilibatkan dalam rapat koordinasi pendahuluan, telah disampaikan pertimbangan-pertimbangan personil sesuai permintaan Ka Satuan.

##### 2) Tahap pengorganisasian.

a) Secara informal, pejabat fungsi Binpers telah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan personil dalam rangka pembentukan UKL, melalui Kasat Operasional yang terlibat dalam Operasi.

b) Sejauh terdapat keterlibatan anggota dari komponen fungsi Binpers, maka pejabat fungsi Binpers yang bersangkutan, terlibat aktif dalam pengerahan anggota tersebut.

#### 3) Tahap pelaksanaan.

a) Secara informal, pejabat fungsi Binpers telah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan personil dalam rangka pelaksanaan Operasi, melalui Kasat Operasional yang terlibat dalam Operasi.

b) Sejauh menyangkut keterlibatan anggota dari komponen fungsi Binpers, maka pejabat fungsi Binpers yang bersangkutan, terlibat aktif dalam tahap ini.

c) Pejabat fungsi personil baru dimintakan peranannya bila anggota Satgas terkena musibah dalam penugasan (cidera, meninggal, kecelakaan).

##### 4) Tahap pengendalian.

a) Keterlibatan pejabat fungsi personil dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan personil, masih bersifat informal.

b) Pejabat fungsi personil baru dimintakan peranan/perhatiannya bila timbul kasus-kasus pelanggaran disiplin/penyimpangan pelaksanaan tugas yang sifatnya menonjol (misalnya pungli, penganiayaan, penggelapan barang bukti, dan lain seterusnya).

#### 10. Bidang Logistik

Kondisi penyelenggaraan pembinaan Logistik di dalam mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian dewasa ini, adalah sebagai berikut :



## 11. Bidang Anggaran

### a. Pelaksanaan Operasi Rutin Kepolisian.

#### 1) Perencanaan.

a) Penyusunan Rencana Anggaran diawali dengan pengumpulan data personil, Materiil Logistik, data kriminalitas dan data giat Operasional, rencana anggaran yang dilengkapi data ini merupakan proses penting dalam penyusunan DUK/DUP.

b) Penyiapan piranti lunak berupa juklak/juknis di dalam rangka pelaksanaan anggaran.

#### 2) Pengorganisasian.

a) Sesuai dengan Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984, Keputusan Kapolri Nomor Pol Kep/09/X/1984 dan Kep/07/VII/1985 tentang Organisasi Kepolisian Republik Indonesia.

b) Untuk keperluan perumusan, penyusunan dan pengelolaan anggaran dibentuk panitia anggaran baik tingkat Departemen, unit organisasi, maupun tingkat Kotama.

#### 3) Pelaksanaan.

a) Penyaluran dana ke Satker berjenjang mulai dari penerimaan OM dan Men Hankam, SKOIN dari Pangab dan SKOP dari Kapolri serta P3 turun dari Kotama.

b) Rekomendasi sebagai pemberi arah dalam pencapaian prioritas sasaran yang hendak dicapai.

c) Keterlambatan dana pada Satker ditutupi oleh dana siap pakai yang disalurkan oleh Kapolda kepada Satker termasuk Polsek sebagai ujung tombak Polri dan apabila dana APBN telah ada, maka dana siap pakai dikembalikan.

#### 4) Pengendalian.

a) Pengendalian di bidang anggaran lebih dititik beratkan kepada upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

(1) Mengutamakan tindakan pencegahan daripada penindakan.

(2) Partisipasi pengelola anggaran

(3) Membimbing dan mendidik.

(4) Prinsip keadilan.

b) Pengendalian Kasatker kepada pengelola anggaran meliputi pengendalian terhadap pembukuan, laporan situasi keuangan, antara lain laporan kemajuan, laporan kemajuan fisik proyek pembangunan, laporan Triwulan.

#### b. Pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian.

##### 1) Perencanaan.

a) Bersama-sama fungsi personil, logistik, membuat Ren Ban Min Log untuk menentukan kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian yang akan dilaksanakan.

b) Menyiapkan Dok Perwabgar

sehingga persiapan di dalam menerima dan segera menyalurkan anggaran kepada pelaksana-pelaksana Opsus.

## 2) *Pengorganisasian.*

a) Struktur organisasi bidang anggaran merupakan bagian dari Struktur Organisasi Operasi Khusus Kepolisian yang dilaksanakan.

b) Badan pengelola keuangan Polri meliputi Diskusi Unit Organisasi/KU Kotama, Pemas, dan Juru Bayar, bertugas menyelenggarakan penyaluran dana sesuai dengan rencana program yang telah disahkan.

## 3) *Pelaksanaan.*

a) Pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian terpusat didukung oleh dana Operasi Khusus, yang dipusatkan di Mabes Polri.

b) Sedangkan untuk Operasi Khusus Kepolisian mandiri Kewilayahan didukung oleh dana Kewilayahan namun sudah dialokasikan dari pusat.

4) *Pengendalian.* Pengendalian dibidang anggaran dalam Operasi Khusus diarahkan kepada penggunaan anggaran oleh UKL di dalam menangani TO.

Polri belum tersusun dengan jelas (belum baku).

b) Sispullahjianta yang selama ini dijadikan pedoman baru dimanfaatkan pada penggunaan Silops, sedangkan Simin belum terlaksana dengan baik karena ketuntuan mengenai Simin (bagaimana pelaksanaannya) tidak tercantum dalam Sispullahjianta.

## 2) *Aspek Personil.*

a) Personil yang memiliki kemampuan di bidang komputer terutama Programnya dan analisis masih terbatas, sedangkan rencana kebutuhan personil dalam meningkatkan kualitas melalui pendidikan dan latihan di bidang komputer belum tersusun karena terbatas dana.

b) Persyaratan keahlian bagi personil (kualitas/kuantitas) belum tersusun dengan baik.

## 3) *Aspek fasilitas.*

a) Sarana dan prasarana penyampaian/fasilitas informasi seperti alkomlek dan peralatan komputer masih digunakan secara umum (untuk memenuhi kebutuhan kesatuan) belum ada pembagian kerja yang jelas karena prasarana masih terbatas.

b) Rencana penggunaan peralatan untuk sistem informasi belum terinci secara lengkap sehingga dalam pelaksanaannya sering mengalami hambatan, antara lain adanya peralatan yang rusak, kurang suku cadang dan sebagainya.

## 12. Bidang Sistem Informasi Polri.

### a. *Perencanaan.*

#### 1) *Aspek sistem dan metode.*

a) Sistem dan metode informasi



#### 4) *Aspek data dan informasi.*

a) Belum adanya penentuan yang jelas mengenai jenis atau macam elemen data.

b) Bank data belum berfungsi.

c) Jangka waktu guna penyusunan rencana induk mengenai penyusunan data dan informasi serta jaringannya belum ada.

#### b. *Pengorganisasian.*

##### 1) *Aspek sistem dan metode.*

a) Arus berita belum dilaksanakan secara integratif antar fungsi.

b) Prosedur dan mekanisme pengelolaan data/informasi bidang pembinaan maupun Operasional belum dibagi/disusun dengan jelas.

##### 2) *Aspek personil.*

a) Jenjang keahlian belum diatur/dirumuskan secara baku.

b) Struktur kualifikasi personil belum tersusun.

##### 3) *Aspek fasilitas.*

a) Kualifikasi fasilitas sistem informasi belum jelas.

b) Sarana pendukung masih terbatas.

##### 4) *Aspek data dan informasi.*

a) Struktur data dan informasi terutama dalam mendukung kegiatan Operasional belum ada.

b) Jenis/macam data dan informasi dari Simin dan Silops belum terpadu.

#### c. *Penyelenggaraan.*

1) *Aspek sistem dan metode.* Pelaksanaan pembinaan sistem informasi Polri yang ada (melalui Simin dan Silops) masih belum lancar sehingga belum terwujud implementasi sistem dan metode serta interaksi antar fungsi.

2) *Aspek personil.* Penempatan personil yang ada hanya untuk memenuhi DSPP dan belum sesuai dengan tingkat kemampuan/keahlian personil sehingga pendaftarannya belum terlaksana secara terarah dan optimal.

3) *Aspek fasilitas.* Kondisi fasilitas yang dimiliki masih terbatas (kuantitas dan kualitas) dan belum mampu mendukung secara maksimal khususnya dalam tugas Operasional.

4) *Aspek data dan informasi.* Data dan informasi yang dihasilkan masih berbeda antara fungsi yang satu dengan lainnya karena kurangnya keterpaduan.

#### d. *Pengawasan dan pengendalian.*

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan penyelenggaraan sistem informasi Polri masih belum efektif, antara lain karena lemahnya prosedur dan disamping itu pejabat di bidang pengawasan, dan pengendalian juga dituntut untuk memiliki kemampuan/pengetahuan di bidang informasi.



### 13. Kelemahan-kelemahan.

#### a. Di bidang Personil.

1) Dalam Operasi Rutin Kepolisian.

##### a) Tahap perencanaan.

(1) Ren Proja/Proja/Progiat/Rengiat personil belum sepenuhnya diorientasikan kepada kebutuhan Operasional dalam menghadapi hakekat ancaman Kamtibmas.

(2) Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan belum mengarah secara tajam dan tepat pada sasaran-sasaran sesuai tingkat kesatuan.

(3) Perencanaan pengembangan kemampuan personil untuk kebutuhan Operasional dihadapi pada kendala terbatasnya dana yang tersedia.

(4) Fungsi Personil tidak dilibatkan secara langsung dalam menyusun kebijaksanaan pelaksanaan tugas Operasional.

##### b) Tahap pengorganisasian.

(1) Menempatkan/penugasan personil baik melalui TOA/TOD, diputuskan atas dasar penilaian yang diwarnai secara dominan oleh faktor subyektif.

(2) Masih terdapat kejanggalan-kejanggalan penempatan/penugasan personil bila ditinjau dari pola pembinaan karier, kualitas personil dan DSP.

##### c) Tahap pelaksanaan.

(1) Pelaksanaan program kegiatan-

an/rencana kegiatan, belum sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

(2) Penerapan ketentuan Juklak/Juknis belum konsisten/akurat.

(3) Pengembangan kemampuan belum dapat memenuhi kebutuhan Operasional.

(4) Penempatan dan penugasan kurang memperhatikan aspek kemampuan, kondisi wilayah dan skala prioritas.

(5) Penilaian dalam pembinaan karier masih belum terjangkau secara obyektif.

(6) Perawatan personil masih belum sepenuhnya dapat terjangkau, sehingga dapat menurunkan moril personil.

##### d) Tahap pengendalian.

(1) Belum terdapat secara konsisten penyelenggaraan gelar pembinaan, sehingga sejauh mana pencapaian sasaran program tidak dapat diketahui, demikian pula revisi program tidak dapat dilakukan segera setelah ditemukan kendala/perubahan dalam pelaksanaan.

(2) Laporan periodik personil belum tepat waktu dan belum sepenuhnya memberikan informasi pelaksanaan program secara obyektif.

(3) Tindakan koreksi/perbaikan yang dilakukan belum konsisten. Dalam banyak hal upaya perbaikan belum disertai dengan tin-



dakan rehabilitasi, sehingga dalam pencatatan personil yang selalu terdapat adalah perbuatan-perbuatan tercela/negatifnya saja.

(4) Pejabat fungsional Binpers, tidak diundang/dilibatkan secara formal dalam pelaksanaan gelar Operasional Rutin.

## 2) Operasi Khusus Kepolisian.

### a) Tahap perencanaan.

(1) Pertimbangan personil dalam rapat koordinasi terbatas (seandainya pejabat fungsional Binpers diundang), disampaikan belum sesuai dengan ketentuan/format Kir Pers.

(2) Rencana fungsi yang disusun, kebanyakan dilakukan tanpa pelibatan pejabat fungsi Binpers secara langsung dalam kepanitiaan penyusunan Renops.

(3) Dalam pembuatan Kir Pers tidak ada pernyataan secara konseptual untuk mendukung pelaksanaan Operasi Khusus.

(4) Materi rencana fungsi (Reminlog) belum memenuhi kebutuhan.

(5) Kurang mempertimbangkan segala resiko personil bila operasi akan mulai dan selesai dilaksanakan.

### b) Tahap pengorganisasian.

(1) Pejabat fungsi personil tidak dilibatkan secara formal dalam tahap ini.

(2) Pertimbangan-pertimbangan

personil yang diberikan oleh pejabat fungsional Bin Pers secara informal lebih bersifat pribadi/subyektif.

(3) Belum melaksanakan inventarisasi personil sesuai kebutuhan yang akan dilibatkan dalam rangka pelaksanaan operasi.

(4) Belum dilaksanakan koordinasi dalam penyiapan personil pengganti/tenaga perkuatan, baik yang menyangkut jumlah, kualitas maupun sumber pengadaannya.

### c) Tahap pelaksanaan.

(1) Pejabat fungsi personil tidak dilibatkan secara formal dalam tahap ini.

(2) Masalah personil, yang timbul, sering tidak dapat dipecahkan segera oleh unsur-unsur Satgas dan dapat mengganggu kelancaran/citra pelaksanaan operasi.

(3) Menjelang pelaksanaan operasi belum melaksanakan latihan terhadap personil yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan operasi

(4) Belum ada atau belum disiapkan perangkat yang dapat dipakai untuk memantau penilaian personil selama operasi dilaksanakan.

(5) Belum adanya HTCK yang diberlakukan selama operasi yang berkaitan dengan fungsi personil.

### d) Tahap pengendalian.

(1) Pejabat fungsional Binpers tidak diundang secara formal dalam pelaksanaan gelar Operasional Khusus.



(2) Evaluasi pelaksanaan operasi dari aspek personil bersifat sektoral (sempat) karena ditinjau semata-mata dari visi Kasat Operasional yang terlibat dalam satuan tugas.

(3) Belum sepenuhnya dapat memantau kegiatan dan hasil yang dicapai serta belum melaksanakan Anev yang berkaitan dengan aspek penggunaan personil dalam operasi, berdasarkan laporan operasi dan hasil gelar operasi.

(4) Belum melaksanakan supervisi operasi dalam kegiatan tim terpadu, dalam rangka mendapatkan masukan yang bermanfaat dan mendorong dinamika operasi.

#### b. Di bidang Logistik.

Kelemahan-kelemahan dibidang Logistik dalam dukungan operasi Kepolisian adalah :

##### 1) Dalam Operasi Rutin Kepolisian

#### a) Perencanaan.

Penyusunan program dan anggaran logistik ditingkat Mabes dan Kewilayahan belum dapat dilaksanakan secara intensif, disebabkan karena Pola Logistik yang ada belum akurat dimana sistim pendataan masih bersifat manual dan belum dapat terintegrasi dengan sistim komputerisasi, sehingga pemutakhiran data selalu tidak cocok, yang selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain (fungsi-fungsi logistik lainnya) mengalami hambatan.

#### b) Pengorganisasian.

(1) Adanya penggantian-penggantian Personil Logistik, terutama yang ahli dibidang logistik, tidak direncanakan.

(2) Pengorganisasian Komlek setingkat Mabes Polri yang ada ini tidak dapat mendukung operasi secara penuh, karena struktur yang ada sekarang cenderung berorientasi kepada penyiapan dan pemeliharaan peralatan komlek, bukan berorientasi kepada pengembangan dan pembinaan sistim Komlek Polri, dimana dapat membina secara terpusat langsung semua komlek yang berada di Kewilayahannya.

(3) Terbatasnya personil komlek yang mempunyai kualifikasi teknis komlek.

(4) Kemampuan pejabat pembina logistik di kewilayahan kurang menguasai bidang tugasnya.

#### c) Pelaksanaan.

(1) Alokasi/dropping anggaran biasanya terlambat sehingga terjadi everloop.

(2) Belum dapat memenuhi ketepatan dalam pendistribusian, yang meliputi :

- tepat jenis
- tepat kualitas
- tepat waktu
- tepat jumlah

(3) Terbatasnya fasilitas angkutan, serta kondisi sebagian Ranmor yang sudah kondisi usia tua,



sehingga berpengaruh pada mobilitas kesatuan.

(4) Belum adanya standarisasi Matlog Polri (alut/alsus).

(5) Belum lengkapnya norma indeks.

(6) Belum berjalan sepenuhnya sistim informasi data logistik.

(7) Terbatasnya dana pemeliharaan, disamping rasa kurang tanggung jawab sebagian besar pemakai inventaris/materiil-materiil logistik.

d) *Pengawasan dan Pengendalian.*

(1) Peran serta para Kepala Kesatuan/Pimpinan Satker terhadap penyelenggaraan pembinaan logistik relatif kurang, dan hanya diserahkan kepada anggotanya.

(2) Pengawasan melekat dari para pejabat fungsionalis penyelenggaraan pembinaan, relatif kurang.

2) *Dalam Operasi Khusus.*

a) *Perencanaan.* Penyusunan Ren Ban Min, sebagai lampiran Renops yang akan dilaksanakan hanya bersifat formalitas. Pelibatan fungsi logistik cenderung ditinggalkan dalam penyusunan Renops, apabila dilibatkan hanya bersifat formalitas.

b) *Pengorganisasian.* Dalam pelaksanaan Operasi Khusus, tidak disiapkan/ditunjuk personil logistik secara khusus untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang teruang dalam Ren Ban Min (Log).

c) *Pelaksanaan.* Ren Ban Min yang telah disusun, tidak dilaksanakan secara maksimal/sepenuhnya.

d) *Pengawasan dan pengendalian.* Selama berlangsung operasi khusus, wasdal hanya dilaksanakan di atas kertas dalam bentuk laporan penggunaan duklog sesuai Ren Ban Min.

c. *Kelemahan-kelemahan di bidang anggaran.*

1) *Operasi Rutin.*

a) *Perencanaan.*

(1) Dalam penyusunan DUK masih ada petugas yang belum mengerti tata cara penyusunan/pembuatannya atau cenderung pembuatannya hanya sekedar formalitas dimana sasaran dan bentuk kegiatan masih belum mempedomani Kir Intel dan Anev pelaksanaan program kerja tahun yang lalu.

(2) Personil yang menyusun DUK/DUP memiliki keterbatasan di bidang pelaksanaan tugas Operasional, sehingga kurang menghayati kebutuhan anggaran untuk mendukung tugas Operasional.

(3) Panitia anggaran dalam penyusunan anggaran belum melibatkan para pelaksana Operasional sehingga DUK yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan Ren Giat Operasional yang akan dilaksanakan sehingga DUK belum dapat mendukung kegiatan Operasional.



b) *Organisasi.*

(1) Di dalam rangka pelaksanaan tugas penyaluran dana melalui NPBP dari Disku ke keuangan Kotama dan NPB dari keuangan Kotama ke Pekas masih sering terlambat, sehingga dana terlambat diterima oleh Penggunaan padahal P3 sudah diterima.

(2) Pekas dan Juru Bayar di dalam melaksanakan tugasnya sering dipengaruhi oleh para penggunaan anggaran sehingga dana yang ada tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

c) *Pelaksanaan.*

(1) Penerimaan dana operasi sering terlambat/tidak tepat waktu, sedangkan pihak lain kegiatan Satker harus tetap berjalan sesuai dengan program kegiatan.

(2) Pedoman penggunaan dana tersebut belum jelas sehingga menimbulkan keraguan di dalam penggunaan dana tersebut.

d) *Pengendalian.*

(1) Masih ada Kasatker yang memberikan kewenangan/kepercayaan penuh pada Juru Bayar dalam pengelolaan keuangan Satker disebabkan karena Kasatker kurang mempunyai kemampuan di bidang manajemen program dan anggaran Polri, disamping itu karena kesibukan dari Kasatker.

(2) Administrasi pembukuan serta laporan keuangan sering kurang

mendapat perhatian dari setiap Kasatker, sehingga penggunaan anggaran dan dana untuk penyelesaian program tidak dapat terlaksana dan bahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Masih seringnya terjadi kelambatan penyampaian laporan situasi keuangan, sehingga mengakibatkan keterlambatan siklus penganggaran.

2) *Operasi Khusus.*

a) *Perencanaan.*

(1) Ren Ban Minlog yang disusun untuk menunjang Opssus yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada TO, CB dan Sunkuat dalam Opssus.

(2) Pengelola anggaran tidak dilibatkan dalam tahap-tahap perencanaan dalam Operasi Khusus.

b) *Organisasi.* Secara organisator pengelola anggaran hanya tercantum secara formal dalam struktur organisasi namun tidak dilibatkan dalam penentuan sasaran Opssus yang dilaksanakan, sehingga mempengaruhi keberhasilan penyusunan anggaran.

c) *Pelaksanaan.* Masih sering dialami keluarnya Prinops pada Operasi Khusus Kepolisian tidak disertai dukungan dana operasi, dukungan dana tersebut diterima dalam tahap pelaksanaan operasi.

d) *Pengendalian.*

(1) Administrasi pembukuan serta laporan keuangan/anggaran Ops-



sus Kepolisian kurang mendapat perhatian dari Kalakkas Ops.

(2) Masih sering terjadi keterlambatan penyampaian laporan situasi keuangan/anggaran yang mendukung pelaksanaan Opsus Kepolisian.

d. *Dibidang Sistem Informasi Pembinaan.*

- 1) Belum ada ketentuan-ketentuan yang baku (piranti lunak) mengenai SIP (Sistem Informasi Polri) sebagai pedoman yang merupakan penjabaran dari Sistem Informasi Hankamneg.
- 2) Belum ada Bank Data yang dimiliki Polri yang merupakan dapur data dan informasi baik dibidang pembinaan maupun operasi, sedangkan Puskodalops maupun Pullahta masih berjalan sendiri-sendiri dalam arti Puskodalops menghimpun data Opsnal (Silops) dan Pullahta menghimpun data bidang pembinaan (Simin). Sedangkan HTCK yang mengatur arus data/informasi melalui satu pintu belum ada.
- 3) Koordinator antar fungsi maupun fungsi dengan Puskodalops/Pullahta dalam penyelenggaraan Sistem Informasi belum mantap.
- 4) Personil yang mengawaki peralatan komunikasi terutama komputer masih terbatas (kurang terlatih).
- 5) Kerahasiaan mengenai pengiriman data/informasi kurang diperhatikan.

### BAB III

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEM-PENGARUHI

### 14. Kendala

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pembinaan sumber daya dalam mendukung operasi Kepolisian adalah:

#### a. *Bidang personil.*

- 1) Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan operasi Kepolisian pengemban fungsi personil belum dilibatkan secara optimal.
- 2) Sistem informasi dan Pullahjian-ta personil baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas yang ada pada pengemban fungsi pers dirasakan masih lemah.
- 3) Pokok-pokok penyelenggaraan Binpers, baik oleh Kepala Satuan maupun oleh Pejabat Struktural fungsi Binpers belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

#### b. *Bidang Materil/Logistik.*

- 1) Dalam rangka MOP pengemban fungsi logistik masih belum banyak dilibatkan dalam mendukung keberhasilan operasi.
- 2) Anggaran dukungan logistik dalam penyelenggaraan operasi khusus Kepolisian sering langsung ditangani oleh fungsi Operasional tanpa melibatkan pengemban fungsi logistik.
- 3) Masih adanya anggapan dari Unsur Operasional bahwa tanpa



dukungan unsur pengemban fungsi logistik, operasi Kepolisian tetap bisa dilaksanakan.

4) Dalam pengadaan logistik masih belum memenuhi ketepatan dalam hal jumlah, kualitasnya, jenisnya maupun waktu pengadaannya.

#### c. Bidang Anggaran.

1) Keterbatasan pengetahuan Kasatker dibidang Administrasi Keuangan dan dalam penentuan selektifitas dan prioritas kegiatan, menyebabkan kebijaksanaan yang diambil di bidang Anggaran sering menghambat pelaksanaan kegiatan Operasional Kepolisian.

2) Masih dirasakan kurangnya kemampuan Kasatker dalam hal membuat perkiraan dan penyusunan kebutuhan Anggaran dikaitkan dengan Kirka, tinjauan dan Analisa Proja Satker dan kebijaksanaan pimpinan lainnya.

3) Penerbitan SKO, SKOP dan P3 lambat.

4) Penghayatan petugas pengelola anggaran terhadap tugas-tugas Operasional masih kurang.

5) Dana/anggaran Triwulan untuk mendukung kegiatan Operasional terlambat diterima Kasatker.

#### d. Sistem Informasi Polri (SIP)

1) Akumulasi data dan pengolahan data terpusat, tepat, cepat dan akurat belum dapat dipenuhi.

2) Setiap komponen dalam organisasi Polri memiliki dan mengem-

bangkan pola pembinaan informasi masing-masing, tanpa banyak memperhitungkan tuntutan integrasi dalam ikatan dengan organisasi yang lebih besar.

3) Dispullahta Polri selaku pembina fungsi kepullahtaan di seluruh jajaran Polri belum mampu menjalankan fungsi dan tugas pokoknya secara optimal.

### 15. Faktor Peluang

#### a. Bidang Personil.

1) Mantapnya integrasi dilingkung-an ABRI merupakan faktor yang menguntungkan bagi Polri dalam menyiapkan kebutuhan personil guna mendukung kegiatan Operasi Kepolisian.

2) Tersedianya RTCK antar badan pada tingkat pusat maupun kewilayahan Polri terutama RTCK di lingkungan fungsi Operasional Polri.

3) Pembinaan personil Polri terutama dalam rangka meningkatkan kualitas personil melalui Pendidikan Kejuruan maupun penataran-penataran baik di tingkat pusat maupun daerah sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan dan rasa kepercayaan diri/sikap mental petugas di lapangan.

#### b. Bidang Materil/Logistik.

1) Sebagian personil logistik telah mengikuti pendidikan kejuruan



di bidang logistik.

2) Logistik yang ada di kewilayahan walaupun terbatas masih cukup mampu dalam mendukung kegiatan operasi Polri.

3) Piranti lunak dalam mendukung operasi Khusus Kepolisian (Kir Log) tetap disiapkan.

#### c. Bidang Anggaran.

1) Sudah tersedianya piranti lunak yang mengatur prosedur dibidang anggaran baik yang menyangkut operasi rutin maupun operasi khusus.

2) Dengan tersedianya dana siap pakai sangat membantu kelancaran penyelenggaraan operasional baik operasi rutin maupun operasi khusus sehubungan dengan sering terlambatnya penerimaan anggaran operasi rutin maupun operasi khusus.

#### d. Bidang Sistem Informasi Polri (SIP)

1) Telah dibakukannya pokok-pokok penyelenggaraan Pembinaan Sistem Informasi Hankamneg yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Polri.

2) Adanya berbagai kebijaksanaan Pimpinan Polri dalam membina dan mendaya gunakan sistem Informasi Polri untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen di dalam organisasi Polri. Kebijakan-kebijaksanaan tersebut terdapat dalam pola

dasar pembenahan Polri, Rekonfu serta optimasi dan dinamisasi.

3) Dari segi penyelenggaraan sistem informasi Polri, telah adanya tatanan, pengendali, wewenang dan tanggung jawab yang terdiri dari penanggung jawab umum, penanggung jawab fungsi dan penanggung jawab teknis.

4) Tersedianya perangkat/alat pendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Polri seperti alat komunikasi, tata cara/prosedur penggunaannya, sistem komunikasinya serta petugas yang mengoperasikan peralatan tersebut.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBINAAN SUMBER DAYA YANG DIHARAPKAN

### 16. Peranan Pembinaan Sumber Daya Dalam Mendukung Tugas Operasional.

a. Pada prinsipnya lingkup tugas pembinaan sumber daya adalah menyiapkan dan menyerahkan segenap potensi unsur-unsur sumber daya yang meliputi personal, logistik, anggaran dan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas operasional.

b. Dari penyelenggaraan pembinaan sumber daya yang optimal, diharapkan mampu memberikan dukungan :

1) Personil dengan postur kekuatan dan postur kemampuan



yang sesuai dengan kebutuhan Opsnal.

2) Materiil, Fasilitas dan juga yang tepat jumlah, tepat kualitas, tepat jenis dan tepat waktu.

3) Anggaran yang memadai dan tepat waktu.

4) Informasi yang bermakna tepat waktu dan akurat.

c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Opsnal, peranan sumber daya diwujudkan secara nyata mulai dari awal kegiatan fungsi manajemen dalam manajemen Opsnal Polri yang ditandai dengan adanya keterlibatan aktif pejabat fungsional pembinaan sumber daya dalam setiap tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta penyusunan produk perencanaan kegiatan/perkiraan-perkiraan, data/informasi baik dalam operasi rutin maupun dalam operasi Khusus Kepolisian.

d. Dalam operasi rutin Kepolisian, keterlibatan peranan sumber daya bermula sejak diterimanya Kir Intel tahunan, dan berakhir pada penyelesaian seluruh kegiatan yang ditandai dengan penyusunan analisa dan evaluasi program kerja dan anggaran tahunan.

e. Dalam operasi khusus Kepolisian, keterbatasan peranan sumber daya, bermula sejak diterimanya Kirsus Intel dan berakhir pada tahap purna operasi yang ditandai dengan penyusunan laporan anali-

sa dan evaluasi pelaksanaan operasi.

## 17. Implementasi peranan Binpers.

a. *Dalam Operasi Rutin.*

1) *Tahap perencanaan.*

a) Menyusun dan menghasilkan produk rencana program kerja/program kerja/program kegiatan/rencana kegiatan bidang personil, sesuai kebutuhan operasional, antara lain mengandung :

(1) Prioritas personil baik kualitas maupun kuantitas untuk satuan Operasional (menghindari Top Heavy).

(2) Prioritas penempatan personil sesuai DSP dengan memperhatikan lapis kemampuan yang harus tersusun pada setiap tingkat kesatuan.

(3) Prioritas kebutuhan personil sesuai kebutuhan operasional baik kuantitas maupun kualitas.

(4) Rencana peningkatan kemampuan personil baik melalui pendidikan/latihan yang mengacu kepada kebutuhan Opsnal.

b) Menyusun dan mengajukan perkembangan pertimbangan bidang personil lainnya yang dipandang perlu untuk mendukung pelaksanaan tugas Operasional.

2) *Tahap pengorganisasian.*

a) Mengarahkan kekuatan personil sesuai dengan program/ren-



giat yang telah disusun untuk mendukung kegiatan Operasional.

b) Memantau validasi organisasi dikaitkan dengan kebutuhan Operasional.

c) Mengajukan perkembangan-perkembangan lain dibidang personil yang dipandang perlu.

### 3) Tahap pelaksanaan.

a) Memantau pelaksanaan tugas personil secara langsung atau melalui koordinasi fungsional yang meliputi aspek mental kepribadian, prestasi kerja dan perkembangan potensi/kualitas kemampuan, melalui pendekatan mutu dan kuantitatif dan kualitatif.

b) Menyelenggarakan pergantian personil baik dengan pola giliran penyusun/giliran daerah penugasan, sesuai kebutuhan Operasional.

c) Mengajukan saran/pertimbangan personil yang dipandang perlu kepada pimpinan kesatuan/penggunaan personil, guna memelihara dinamika dan efektivitas Operasional.

### 4) Tahap pengendalian.

a) Menyusun/menyampaikan laporan periodik bidang personil sesuai ketentuan.

b) Menyelenggarakan gelar pembinaan personil sesuai ketentuan.

c) Menyampaikan hasil evaluasi/pertimbangan personil yang dipandang perlu dalam gelar Operasional rutin.

d) Menyampaikan laporan periodik/laporan khusus bidang personil.

b. Dalam Operasi Khusus Kepolisian.

### 1) Tahap perencanaan.

a) Menyusun/menyampaikan perkiraan keadaan personil pada rapat pendahuluan, penyusunan Renops, setelah penyampaian Jukren oleh Kapolri/Mapolda/Kapolres.

b) Menyusun Renban Minlog aspek personil sebagai pelengkap lampiran Renopps.

c) Menyampaikan pertimbangan/pertimbangan personil lainnya yang dipandang perlu.

### 2) Tahap pengorganisasian.

a) Memantau penyelenggaraan pembentukan Satgas/UKL, apakah telah sesuai dengan rencana tindakan yang diajukan dalam Renban Minlog.

b) Memantau penyiapan fasilitas perawatan personil Satgas, seperti Rumah Sakit, bivak, posko, ruang istirahat, pemondokan dan lain sebagainya, sesuai rencana tindakan dalam Renbanminlog.

c) Memantau penyelenggaraan penempatan/penggunaan personil dari unsur perkuatan dari instansi lintas sektoral.

d) Menyelenggarakan koordinasi antar fungsi/lintas sektoral/Kasatgas berkenaan dengan masalah-



masalah personil yang dipandang perlu.

**3) Tahap pelaksanaan.**

a) Memantau dan membantu evakuasi personil dalam pelaksanaan tugas operasi meliputi aspek mental kepribadian, penempatan tugas, serta prestasi kerja.

b) Membantu/mengkoordinasikan kegiatan/kegiatan penggantian personil.

c) Membantu/mengkoordinasikan kegiatan perawatan personil, evakuasi personil

d) Membantu/mengkoordinasikan kegiatan penindakan disiplin/pemberian tanda imbalan/penyaluran hak-hak prajurit.

e) Mengajukan pertimbangan-pertimbangan bidang personil yang dipandang perlu kepada Kasatgas Ops/Kasatfung.

**4) Tahap pengendalian.**

a) Mengajukan pertimbangan-pertimbangan/evakuasi bidang personil dalam gelar Operasional khusus.

b) Membantu penyelenggaraan kegiatan konsolidasi.

c) Membantu penyusunan laporan pelaksanaan operasi aspek personil.

**18. Implementasi peranan Binlog.**

**a. Dalam Operasi Rutin.**

**1) Tahap perencanaan.**

a) Menyusun/menghasilkan produk rencana program kerja/projeksi/progiat/rengiat dibidang Logistik, sesuai kebutuhan Operasional, antara lain mengandung :

(1) Prioritas materiil, fasilitas, jasa untuk satuan-satuan Operasional terdepan.

(2) Prioritas distribusi materiil baik kualitas maupun kuantitas untuk mengisi DSPP dengan memperhatikan lapis kekuatan/kemampuan peralatan utama/peralatan khusus pada setiap tingkat satuan.

(3) Prioritas kebutuhan alat/alsus, fasilitas dan jasa sesuai kebutuhan Operasional.

(4) Prioritas pengadaan/perbaikan materiil.

b) Mengajukan pertimbangan-pertimbangan lain dibidang logistik yang dipandang perlu untuk mendukung pelaksanaan tugas Operasional.

**2) Tahap pengorganisasian.**

a) Menyerahkan dukungan logistik dengan program/rengiat.

b) Memantau validasi daya guna logistik (Matfasgas) baik untuk kebutuhan operasional maupun untuk kepentingan organisasi secara keseluruhan.

c) Mengajukan pertimbangan-pertimbangan lain dibidang logistik yang dipandang perlu.

**3) Tahap pelaksanaan.**



a) Memantau pelaksanaan dukungan logistik.

b) Memantau penggunaan materiil, fasilitas dan jasa.

c) Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan/perbaikan sesuai ketentuan.

d) Mengajukan pertimbangan-pertimbangan lain dibidang logistik yang dipandang perlu.

4) *Tahap pengendalian.*

a) Menyelenggarakan gelar pembinaan Logistik.

b) Mengajukan pertimbangan-pertimbangan Logistik yang dipandang perlu dalam gelar Operasional Rutin.

c) Menyampaikan laporan periodik bidang Logistik/laporan khusus bidang Logistik.

b. *Dalam Operasi Khusus.*

1) *Tahap perencanaan.*

a) Menyusun/menyampaikan perkiraan keadaan Logistik pada rapat pendahuluan penyusunan Renops, setelah penyampaian Jukren oleh Kapolri/Kapolda/Kapolres.

b) Menyusun Renbanminlog aspek Logistik sebagai pelengkap lampiran Renops.

c) Menyampaikan pertimbangan-pertimbangan lain di bidang personil yang dipandang perlu.

2) *Tahap pengorganisasian.*

a) Memantau/melakukan penyelenggaraan penyiapan Posko, tempat penampungan personil, bengkel lapangan (Bengharlap), apakah telah sesuai dengan rencana tindakan yang ditentukan dalam Renbanminlog.

b) Memantau/melakukan penyelenggaraan pemasangan instalasi instalasi logistik seperti jaringan komplek, saluran air minum, apakah telah sesuai dengan rencana tindakan yang ditentukan dalam Renbanminlog

c) Memantau apakah titik-titik pembekalan logistik Operasi, telah sesuai dengan rencana tindakan yang ditentukan dalam Renbanminlog

d) Memantau penggunaan peralatan, fasilitas dan jasa termasuk unsur-unsur perbuatan yang diterima, apakah telah sesuai dengan rencana tindakan yang disusun dalam Renbanminlog.

e) Menyampaikan pertimbangan-pertimbangan lain dibidang logistik yang dipandang perlu kepada Ka Satgas/Kasatfung.

3) *Tahap pelaksanaan.*

a) Mengevaluasi daya guna materiil, fasilitas dan jasa yang digunakan, termasuk unsur kekuatan dalam pelaksanaan operasi

b) Menyelenggarakan pemeliharaan, perbaikan, penggantian/penambahan materiil, fasilitas dan jasa sesuai kebutuhan.



c) Mengkoordinasikan tindakan-tindakan korelasi terhadap penyalahgunaan/penyimpangan pemakaian peralatan, fasilitas dan jasa dalam pelaksanaan operasi kepada Kasatgas Ops/Kasatfung yang terkait.

d) Mengajukan pertimbangan-pertimbangan lain dibidang Logistik yang dipandang perlu kepada Kasatgas Ops/Kasatfung yang terkait.

4) *Tahap pengendalian.*

a) Mengajukan pertimbangan logistik yang dipandang perlu dalam gelar Operasional khusus.

b) Membantu penyelenggaraan kegiatan konsolidasi/rehabilitasi.

c) Membantu penyusunan laporan pelaksanaan operasi aspek logistik.

#### 19. Implementasi Peranan Bin Anggaran.

a. *Pada Operasi Rutin.*

1) *Perencanaan.*

a) Perencanaan pembuatan DUK/DUP harus mengacu pada :

(1) Kir Intel

(2) Analisa dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya.

(3) Hasil pemutakhiran data Personil, materiil, logistik dan lumpsum.

b) Perencanaan penyusunan DIK/DIP disesuaikan dengan Ren Proja yang akan dilaksanakan tahun proyeksi.

c) Perencanaan pembuatan PPPA.

d) Perencanaan Distribusi DIK & DIP dan DIK Khusus dan piranti lunak lainnya.

2) *Pengorganisasian.*

a) Pemenuhan personil KU sesuai DSPP.

b) Penempatan personil KU sesuai kualifikasinya.

3) *Pelaksanaan.*

a) Melaksanakan penyusunan DUK/DUP.

b) Melaksanakan penyusunan DIK/DIP dan DIK Khusus sesuai alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

c) Menyalurkan secara tepat dan cepat alokasi anggaran yang tertuang dalam DIK/DIP ke Satker-Satker.

d) Penggunaan dana secara efektif dan efisien dengan menggunakan dua cara yaitu Beban tetap dan beban sementara (UUDP).

e) Dalam hal anggaran belum diterima untuk melaksanakan kegiatan pada Triwulan I Th yang sedang berjalan, dipergunakan dana siap pakai, yang pendistribusiannya ke Satker harus didasarkan pada tingkat-tingkat kerawanan pada Satker-Satker pengguna.

f) Segala hal yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari hendaknya dianalisa, dan dievaluasi.



luasi untuk penyempurnaan pembuatan DUK/DUP pada tahun proyeksi.

#### 4) *Pengendalian.*

a) Pelaksanaan pengendalian terhadap anggaran oganut sistem saluran tunggal dalam arti bahwa penyaluran dana dilaksanakan melalui badan-badan keuangan berjenjang dari atas ke bawah dan pertanggung jawabannya dilaksanakan dari bawah ke atas, oleh karena itu pengendalian dan pengawasan keuangan didelegasikan kepada badan-badan keuangan disamping badan-badan yang mempunyai fungsi pengawasan.

b) Cara pelaksanaannya secara langsung dengan jalan pemeriksaan setempat, inspeksi, kunjungan dan wawancara, serta pengendalian tidak langsung dengan jalan melaksanakan pencocokan dan penelitian terhadap data, dokumen keuangan yang diterima melalui saluran administrasi.

#### b. *Pada Operasi Khusus.*

##### 1) *Perencanaan.*

a) Bersama-sama dengan fungsi logistik, fungsi Pers dan Srena membuat Renban Minlog untuk menentukan kebutuhan anggaran yang akan digunakan dalam operasi khusus.

b) Menyiapkan piranti lunak, pertanggung jawaban keuangan/anggaran Opssus.

##### 2) *Pengorganisasian.*

a) Menyesuaikan dengan struktur organisasi Operasi Khusus.

b) Menunjuk personil secara struktural.

##### 3) *Pelaksanaan.*

a) Menyalurkan dana sesuai alokasi yang telah ditetapkan kepada fungsi Opsnal yang terlibat dalam Opssus secara cepat dan tepat.

b) Membuat pertanggung jawaban penyaluran dana Opssus.

c) Mengarahkan cara-cara pertanggung jawaban penggunaan anggaran.

##### 4) *Pengendalian.*

a) Pengendalian terhadap penggunaan anggaran Opssus telah menganut sistem saluran tunggal.

b) Dengan cara pengendaliannya secara langsung maupun tidak langsung.

## 20. **Implementasi Sistem Informasi Polri dalam mendukung Operasi Kepolisian.**

Sistem Informasi Polri pada hakekatnya adalah Sispullahjianta (Sistem pengumpulan pengolahan dan penyajian data) yang terdiri dari Simin (Sistem Informasi Administrasi) dan Silops (Sistem Informasi Lingkungan Operasional). Dalam mendukung penyelenggaraan Operasi Kepolisian yang telah diatur dengan MOP (Manajemen Operasional Polri), Sistem Informasi Polri hendaknya mempunyai peranan tertentu pada daur fungsi manajemen Operasi-



onal Polri yang diwujudkan pada pelaksanaan sistem dimaksud pada setiap kegiatan Operasi Kepolisian. Peranan Sistem Informasi Polri dalam penyelenggaraan Operasi Kepolisian diwujudkan dengan pembinaan aspek-aspek; Sistem dan metode, personil, fasilitas serta data dan informasi yang dapat mendukung Operasi Kepolisian. Si-min berperan mendinamisasikan Bin-kuat dan sarana keterpaduan fungsi, Silops berperan mempercepat ketanggapan dalam penggunaan kekuatan menghadapi ancaman Kamtibmas.

a. Pada penyelenggaraan Operasi Rutin.

1) Tahap perencanaan.

a) Personil yang mengawaki komponen SIP menyiapkan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan Operasi Khusus, antara lain :

(1) Data dan informasi gangguan Kamtibmas/kriminalitas untuk pembuatan Kir Intel, Program kerja, Petunjuk Perencanaan, dan sebagainya.

(2) Data dan informasi bidang administrasi (personil, materiil, anggaran) untuk penyusunan DUK/DUP dan perencanaan lainnya.

b) Pejabat struktural pengelola SIP menyiapkan komponen SIP, dengan :

(1) Menyusun Rencana Kegiatan untuk mendukung operasi rutin Kepolisian.

(2) Memelihara dan meningkatkan kemampuan dan kesiapan komponen SIP mendukung Operasi Rutin.

2) Tahap pengorganisasian.

a) Menyiapkan data dan informasi personil yang diperlukan untuk keperluan pengorganisasian (mutasi jabatan, mutasi penugasan, penempatan dan sebagainya yang berhubungan dengan penyegeran organisasi).

b) Menyiapkan personil pengembangan fungsi SIP untuk penyelenggaraan Operasi Rutin apabila diperlukan.

c) Penjabaran HTCK bagi setiap personil pengembangan fungsi SIP (dalam hal HTCK Polri/Kesatuan belum dijabarkan).

d) Menunjuk menentukan unsur organisasi Kesatuan yang mengelola secara satu pintu Sistem Informasi Polri khususnya Bank Data dan pusat informasi Kriminil, dalam hal ini paling tepat Disputlahta Polri/Polda.

3) Tahap pelaksanaan.

a) Mengatur penugasan personil komponen SIP untuk pelayanan data dan informasi keperluan pelaksanaan operasi rutin Kepolisian

b) Menyiapsiagakan komponen SIP untuk mendukung kelancaran



arus data dan informasi keperluan operasi rutin Kepolisian.

c) Melaksanakan tugas kewajiban rutin sebagaimana job description yang telah ditetapkan bagi pengembalian fungsi pada komponen SIP, khususnya pelaksanaan Sispullahjianta.

#### 4) Tahap pengendalian.

a) Mempertanggung jawabkan penyelenggaraan SIP dalam wujud laporan berkala, insidental dan laporan anev.

b) Menyiapkan dan menyajikan data dan informasi untuk keperluan pengendalian dan pengawasan.

c) Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan tugas komponen SIP pada kesatuan bawahan.

#### b. Pada penyelenggaraan Operasi Khusus Kepolisian.

##### 1) Tahap perencanaan.

a) Menyiapkan dan menyajikan data dan informasi untuk perencanaan operasi khusus Kepolisian antara lain keperluan penyusunan/pembuatan Kirsus, Renops, Ren fungsi, Juk Ops dan sebagainya.

b) Menyiapkan personil komponen SIP untuk diikuti sertakan dalam operasi khusus bila diperlukan, dan mengatur penugasan dalam mengoperasikan peralatan komponen SIP untuk melayani/mendukung operasi khusus Kepolisian.

c) Membuat rencana kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Operasi Khusus.

d) Membuat Renkomlek sebagai lampiran Renops.

##### 2) Tahap pengorganisasian.

a) Menyiapkan dan menyajikan data/informasi personil kesatuan untuk keperluan pengorganisasian operasi khusus Kepolisian.

b) Menyiapkan dan memberikan data personil komponen SIP yang diikuti sertakan dalam operasi khusus (UKL).

c) Menstrukturkan komponen SIP pada pengorganisasian Operasi Khusus, dalam hal ini pada Posko Operasi.

##### 3) Tahap pelaksanaan.

a) Pemanfaatan maksimal komponen SIP yang dimiliki dengan didukung personil yang memiliki kemampuan di bidangnya.

b) Sistem pengiriman data dan informasi agar diatur melalui Poskodalops yang kemudian diteruskan ke Bank Data (Dispullahta).

c) Penyiapan jaringan komunikasi di lapangan yang bersifat tetap maupun bergerak (mobile) guna mendukung Opssus.

d) Apabila ada gangguan/berusaha terhadap jaringan komunikasi di lapangan agar sementara diatasi melalui kurir atau memanfaatkan fasilitas komunikasi milik Pemerintah maupun swasta.



#### 4) Pengendalian.

a) Penanggung jawab adalah Kapuskodalops.

b) Koordinasi antara Kapuskodalops dengan Kadispullahta dalam pengaturan pengiriman data dan informasi Operasi yang dikirimkan termasuk peralatan komunikasi (jaringan komunikasi) yang digunakan.

c) Pengawasan/supervisi ke daerah Operasi terhadap penggunaan sistem informasi Polri dalam mendukung Operasi Khusus.

d) Membuat laporan dan anev.

### BAB V

## UPAYA MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEM- BINAAN SUMBER DAYA

### 21. Umum.

a. Penentuan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung Operasional Kepolisian diharapkan sudah diperhitungkan sejak dalam proses penentuan target operasi dengan melibatkan unsur-unsur pembina fungsi sumber daya secara terpadu bersama-sama dengan komponen Operasional.

b. Dalam rangka menjamin keterpaduan antara pembina sumber daya dengan bidang Operasional, maka upaya peningkatan pembinaan sumber daya yang meliputi aspek personil, logistik, anggaran serta sistem informasi Polri senan-

tiasa harus diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan Operasional dalam pencapaian target operasi yang telah ditentukan.

c. Sasaran akhir upaya peningkatan pembinaan sumber daya adalah terwujudnya postur Polri yang Mission Ready dengan pemberian bobot peranan yang lebih besar kepada satuan-satuan kewilayahan dan satuan fungsi Operasional yang didukung oleh kekuatan personil dengan jumlah yang cukup dan kemampuan profesional yang dapat diandalkan untuk dihadapkan kepada hakekat ancaman Kamtibmas.

### 22. Bidang Personil.

a. *Operasi Rutin Kepolisian.* Untuk mendukung Operasi Rutin Kepolisian, maka dilaksanakan upaya peningkatan pembinaan personil sebagai berikut :

#### 1) *Tahap perencanaan.*

a) Penyusunan proja bidang pembinaan, khususnya pembinaan personil lebih diorientasikan pada upaya untuk mendukung kebutuhan Opsnal yang disesuaikan dengan hakekat ancaman Kamtibmas yang dihadapi.

b) Penyusunan Program Kegiatan dan Rencana Kegiatan bulanan, mingguan dan harian di bidang personil lebih diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasi rutin.

c) Rencana latihan dalam rangka memelihara dan meningkatkan



kemampuan personil Polri, baik berupa latihan perorangan, latihan fungsi maupun latihan kesatuan harus disusun secara tepat, baik menyangkut tujuan latihan yang akan dicapai, materi latihan, metode latihan, alins alongins yang diperlukan, waktu latihan, peserta latihan, sistem evaluasi, tenaga pelatih dan fasilitas latihan yang diperlukan. Latihan ini harus dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut.

d) Penyusunan produk-produk yang bersifat perencanaan, baik dalam rangka peningkatan kualitas, lewat penugasan melalui rencana *tour of duty* dan *tour of area*, maupun peningkatan kualitas melalui pendidikan dan produk-produk perencanaan lainnya, sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan.

e) Pengikutsertaan fungsi personil dalam penyusunan kebijaksanaan tugas Opsnal.

f) Mengaktifkan rapat-rapat koordinasi di bidang personil, dalam rangka penyusunan konsep pembinaan terhadap personil.

### 2) Tahap pengorganisasian.

a) Penempatan personil pada jabatan dan penugasan yang sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikannya (*the right man on the right place*) serta penilaian kemampuan personil didasarkan atas data obyektif yang

bersifat kuantitatif dan memperkecil faktor-faktor yang bersifat subyektif.

b) Penyempurnaan HTCK dan pertelaan tugas fungsi personil dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Operasional.

c) Melaksanakan re disposisi dan re dislokasi personil sesuai dengan kebutuhan Opsnal.

### 3) Tahap pelaksanaan.

#### a) Penerimaan personil.

(1) Meningkatkan selektivitas di dalam penerimaan personil Polri, melalui prosedur seleksi yang dilaksanakan oleh suatu panitia penerimaan yang dibentuk berdasarkan keputusan Kapolri.

(2) Meningkatkan persyaratan seleksi penerimaan personil Polri, baik persyaratan fisik/kesehatan maupun intelektualitasnya serta kepribadian yang dimiliki. Sebagai contoh untuk kondisi fisik calon personil Polri harus golongan/states I, dan memiliki tinggi badan minimal 165 cm.

(3) Bagi yang telah betul-betul memenuhi persyaratan dinyatakan lulus dan segera dikirimkan ke lembaga-lembaga pendidikan pembentukan Polri.

(4) Pada saat seleksi masuk pendidikan maupun selesainya pendidikan di Lembaga pendidikan Polri maka perlu digalakkan peranan test psikologi.



(5) Di dalam seleksi, utamakan bagi peserta yang mempunyai keakhlian khusus (bela diri) di samping telah memenuhi persyaratan secara umum.

b) *Pendidikan dan Latihan.*

(1) *Pendidikan.*

(a) Meningkatkan penyempurnaan kurikulum di setiap pendidikan Polri. Kurikulum ini hendaknya disesuaikan dengan hakekat ancaman Polri di masa mendatang, sehingga anak didik yang dihasilkan akan mampu melaksanakan tugas Polri di masa mendatang.

(b) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik Polri, dengan menyelenggarakan kursus-kursus tenaga pendidik dan memberikan kesempatan sekolah ke luar negeri.

(c) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan Polri, agar mampu mendukung kegiatan Opsnal secara maksimal.

(d) Meningkatkan alins dan alon-gins pendidikan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, dalam rangka menunjang Operasi khusus Kepolisian.

(e) Meningkatkan pemasyarakatan metode CBSA.

(f) Siswa yang dihasilkan disamping mempunyai kemampuan profesional yang handal sesuai jenjang pendidikannya, juga harus mempunyai jiwa juang yang tinggi, serta fisik yang tangguh.

(2) *Latihan.*

(a) Dalam rangka mendukung operasi rutin, maka setiap kesatuan Polri harus meningkatkan penyelenggaraan latihan perorangan

(b) Peningkatan latihan perorangan tersebut dititik beratkan kepada fungsi Reserse, Lantas, Intel, Binmas dan Sabhara.

(c) Meningkatkan penggunaan metode latihan, driil, simulasi dan diskusi.

c) *Pembinaan karier dan penguasaan.*

(1) *Pembinaan karier.*

(a) Memberikan promosi jabatan tertentu sesuai hak lainnya bagi para personil yang telah berprestasi di dalam melaksanakan tugasnya, khususnya tugas operasi rutin Kepolisian.

(b) Memperlancar kenaikan pangkat bagi personil yang telah memenuhi persyaratan untuk naik pangkat.

(c) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi personil untuk mengikuti pendidikan lanjutan, penataran-penataran/seminar dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

(d) Meningkatkan *tour of duty* dan *tour of area* bagi personil yang telah lama menduduki jabatan/bagian tertentu di suatu kesatuan, maksimal 3 - 5 tahun di setiap bagian.



(e) Pembinaan karier untuk golongan Perwira diselenggarakan sesuai pola dasar karier Perwira Polri menurut tangga jabatan dan kepangkatan yang tersedia.

(f) Pembinaan karier untuk golongan kepangkatan Bintara dan Tamtama pada dasarnya diselenggarakan sesuai pola dasar kejuruan Bintara/Tamtama ABRI menurut saluran jabatan dan kepangkatan yang tersedia.

(2) *Pola penugasan.*

(a) Meningkatkan rotasi penugasan personil dalam rangka operasi rutin Kepolisian, yang didasarkan kepada kemampuan personil untuk menghadapi adanya ancaman Kamtibmas.

(b) Mengembangkan kemampuan personil, sesuai dengan keahlian yang dimiliki melalui penugasan.

(c) Mengefektifkan giliran penugasan personil Polri menurut jangka waktu tertentu sesuai pelaksanaan Operasi Rutin.

d) *Perawatan.*

(1) *Perawatan mental kejuangan.*

(a) Meningkatkan pembinaan mental ABRI yang bertujuan untuk memelihara sikap mental/jiwa kejuangan dan profesionalisme serta perilaku hidup personil Polri sebagai insan pra-jurik Sapta Marga yang menghayati dan mengamalkan Tri-brata dan Catur Prasetya.

(b) Menggalakkan pelaksanaan fungsi Binal, sebagai fungsi komando, yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan Polri di setiap kesatuan.

(c) Meningkatkan penanaman, pengembangan, dan pelembagaan nilai-nilai kejuangan Polri, yang berdasarkan Pancasila, Tri Brata, Sapta Marga dan Catur Prasetya ke dalam dada setiap Prajurit Polri.

(d) Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan umat beragama di setiap kesatuan Polri setingkat KOD ke atas.

(2) *Perawatan jasmani dan kesehatan.*

(a) Meningkatkan penyelenggaraan check up kesehatan secara rutin setiap tahun.

(b) Meningkatkan pelaksanaan test kesehatan jasmani kepada seluruh personil Polri, minimal setahun dua kali.

(c) Meningkatkan dukungan pengobatan bagi personil dengan melengkapi jenis obat di setiap rumah sakit Polri, dan memberikan restitusi pengobatan bagi personil Polri yang berobat di luar.

(3) *Perawatan kesejahteraan personil.*

(a) Meningkatkan pengadaan perlengkapan perorangan personil khususnya bagi personil yang bertugas di lapangan seperti : borgol, tongkat polisi, helm, dan lain-lain.



(b) Meningkatkan pengadaan kendaraan untuk mendukung kegiatan Operasi Rutin Kepolisian.

(c) Mengefektifkan penggunaan anggaran, dengan memprioritaskan dana untuk mendukung operasi rutin.

(d) Meningkatkan kesejahteraan prajurit dengan memberikan insentif yang memadai bagi personil Polri yang melaksanakan Operasi Rutin.

(e) Memberikan hak-hak prajurit secara cepat, tetap dan lengkap.

e) *Pengakhiran Dinas.*

(1) Meningkatkan pelayanan administrasi bagi personil Polri yang telah memenuhi persyaratan usia pensiun.

(2) Bagi personil Polri yang masih potensial dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat diperpanjang dinas aktifnya (khususnya yang berpangkat Kolonel ke atas).

(3) Melancarkan pemberian pensiun dan tunjangan bersifat pensiun bagi personil Polri yang diberhentikan dengan hormat.

4) *Tahap pengendalian.*

a) Melaksanakan gelar pembinaan secara rutin dengan membahas permasalahan di bidang personil, khususnya menyangkut dukungan fungsi personil dalam pelaksanaan tugas Operasi Rutin.

b) Melaksanakan laporan dan pengumpulan data bidang per-

sonil secara periodik, tepat waktu dan tepat data.

c) Mengadministrasikan tindakan koreksi terhadap personil yang melanggar ketentuan dan mencatat di dalam CB personil yang bersangkutan.

d) Validasi terhadap piranti lunak di bidang personil.

### 23. Operasi Khusus Kepolisian.

Upaya meningkatkan pembinaan personil dalam operasi khusus Kepolisian dilakukan dengan upaya peningkatan kegiatan sebagai berikut :

a) *Tahap perencanaan.*

1) Keikutsertaan secara aktif dalam penyusunan dan penetapan petunjuk perencanaan operasi khusus, dengan memberikan saran dan pendapat terhadap kualitas dan kuantitas personil yang berpengaruh terhadap berhasilnya pelaksanaan operasi. Penyampaian sama dan pendapat ini dilakukan dengan cara pembuatan perkiraan personil yang berintikan materi-materi :

a) Kualitas dan kuantitas personil yang dilibatkan dalam operasi.

b) CB yang disarankan dengan melihat kepada personil yang dilibatkan.

c) Hal-hal lain yang berkaitan dengan kemungkinan resiko-resiko yang dihadapi personil dalam melaksanakan tugas operasi.



(2) Kebutuhan materiil jenis barang-barang pembantu untuk mendukung personil sesuai dengan kekuatan personil.

(3) Kebutuhan materiil yang habis pakai, dengan memperhatikan perkiraan materiil yang ada, rusak dan hancur.

(4) Kebutuhan fasilitas logistik yang sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas setiap kesatuan, yang dikaitkan dengan waktu ataupun penggunaan anggaran.

2) *Pada tahap pengorganisasian.* Pada tahap pengorganisasian logistik Polri diselenggarakan sesuai dengan struktur organisasi Polri dari tingkat Mabes sampai Polres untuk dapat melaksanakan Rencana dan program logistik yang telah ditentukan. Pengorganisasian logistik harus dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tanggung jawab yang berpedoman dan menggunakan prinsip-prinsip dengan dasar pertimbangan ketentuan di bidang logistik.

3) *Pada tahap pelaksanaan.*

a) Pengadaan logistik berdasarkan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan rencana program yang telah ditetapkan.

b) Pelaksanaan dukungan logistik Polri dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kesatuan dan jenis materiil yang dibutuhkan, sehingga mampu menjamin efisiensi, ketepatan dan

kecepatan dalam mendukung pelaksanaan operasi rutin Kepolisian

c) Pelaksanaan pendistribusian logistik diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah, hakekat ancaman, dan pelaksanaan tepat waktu.

d) Penggunaan logistik/materiil yang tersedia harus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan operasi rutin Kepolisian.

e) Penggunaan dukungan logistik yang berbentuk sarana yaitu alat-peralatan yang berbentuk alat dan alsus yang ada pada kesatuan-kesatuan di pusat maupun wilayah, dapat dilaksanakan dengan cara penggeseran, dislokasi, maupun redistribusi sesuai kebutuhan operasi rutin yang dilaksanakan.

f) Duklog yang berbentuk bekal yang terdiri dari pangan, BMP, Kaporlap didukung dengan dukungan rutin yang tersedia.

g) Pelaksanaan pemeliharaan materiil yang tersedia harus dapat menjamin agar setiap materiil selalu dalam kondisi siap pakai guna mendukung pelaksanaan operasi rutin Kepolisian.

h) Dalam rangka efisien dalam penggunaan dan pemeliharaan, terhadap materiil yang tidak layak pakai dan tidak ekonomis lagi segera dihapuskan.

4) *Pada tahap pengendalian.*

a) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap seluruh proses



penyelenggaraan pembinaan logistik.

b) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian didukung oleh sarana administrasi dengan mengembangkan sistem informasi Pembinaan Logistik.

b. Pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian.

1) *Pada tahap perencanaan.*

a) Mengikuti rapat terbatas yang diadakan untuk penyusunan rencana Operasi Khusus Kepolisian. Kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahap dalam proses perencanaan dan proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan operasi khusus Kepolisian ialah sebagai berikut :

(1) *Tahap awal.* Kegiatan yang dilaksanakan ialah membantu pimpinan dalam perumusan tugas melalui Analisis Tugas Pokok (APP), yang menghasilkan rumusan tugas yang akan dilaksanakan dalam Operasi Khusus Kepolisian.

(2) *Tahap pengembangan konsep.* Pada tahap ini fungsi logistik memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka penyiapan Petunjuk Perencanaan Operasi Khusus Kepolisian.

(3) *Tahap pembuatan rencana.* Berdasarkan Petunjuk Perencanaan Operasi Khusus Kepolisian yang telah dikeluarkan oleh pimpinan, fungsi logistik selanjutnya menyiapkan rencana fungsi logistik yang dipergunakan sebagai

lampiran Renops. Rencana fungsi logistik ini dituangkan dalam Renminlog (Renbanmin), yang berisi tentang :

(a) Dukungan logistik dalam pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian, berupa penyediaan materiil yang diperlukan.

(b) Pelayanan dan pengurusan logistik terhadap resiko yang timbul dalam pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian.

(c) Pengendalian penggunaan logistik selama pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian.

(4) *Tahap pengkajian.* Terhadap Renops yang dihasilkan, diajukan saran perbaikan bila ada, yang didasarkan pada kondisi logistik yang tersedia.

(5) *Tahap perencanaan pelaksanaan.* Penyesuaian dan perbaikan Renops dan Renminlog atas dasar perkembangan situasi gangguan Kamtibmas terakhir, khususnya gangguan Kamtibmas yang dijadikan sasaran operasi khusus Kepolisian.

b) Menyusun perencanaan kebutuhan dukungan bekal yang berupa pangan dan BMP dan mengajukannya kepada satuan atas untuk dapat dipenuhi. Sementara menunggu keputusan, dalam hal-hal yang sangat mendesak dapat dipergunakan dahulu dari cadangan yang tersedia.

2) *Pada tahap pengorganisasian.* Menyiapkan personil logistik yang



dilibatkan secara langsung dalam struktur organisasi yang diadakan pada Operasi Khusus Kepolisian.

3) *Pada tahap pelaksanaan.*

a) Penyediaan dan pengadaan logistik sesuai dengan Rencana Logistik yang telah ditetapkan.

b) Menyalurkan materiil/logistik kepada setiap personil yang terlibat dalam pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian secara cepat, tepat dan efisien.

c) Mengadakan pemeliharaan materiil yang digunakan dalam pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian agar selalu berada pada kondisi siap pakai.

4) *Pada tahap pengendalian.*

a) Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan materiil agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

b) Pembuatan laporan tentang kondisi materiil, yang digunakan dalam pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian, untuk kepentingan penghapusan dan penggantinya.

25. **Bidang Anggaran.**

a. Peningkatan kemampuan/pengetahuan personil penganbman pengelola keuangan tentang :

1) Tugas Pokok, peranan dan fungsi bidang keuangan.

2) Manajemen program dan anggaran serta MOP.

3) Kebijakann pimpinan yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran.

4) Petunjuk pembinaan keuangan Polri.

5) Peraturan/perundang-undang-an yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Peningkatan kemampuan/pengetahuan personil penganbman dan pengelola keuangan ini dilaksanakan melalui pendidikan, kursus dan penataran, di lembaga pendidikan atau di kesatuan tingkat Polda.

b. Peningkatan manajemen program dan anggaran, yang meliputi :

1) *Perencanaan.*

a) Perencanaan dan penyusunan anggaran didasarkan kepada kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun proyeksi dengan memperhitungkan :

(1) Tugas Pokok, fungsi dan peranan Polri.

(2) Program pembangunan kekuatan Polri.

(3) Renstra Hankam.

(4) Perkiraan keadaan (Kirka).

(5) Data anggaran tahun yang lalu dan perkiraan perkembangan data pada tahun proyeksi.

b) Penetapan selektivitas dan prioritas dalam penyusunan DIK/DIP yang didasarkan pada plafond yang telah ditentukan.



c) Pemutakhiran data personal, materiil dan data-data lumpsum oleh Satker dan dikompulir oleh Srena sebagai bahan penyusunan DUK/DUP.

2) *Pengorganisasian*. Pengorganisasian pada pembinaan sumber daya anggaran secara umum tetap menggunakan organisasi, badan-badan keuangan Polri yang telah ditetapkan dengan keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Struktur Organisasi Polri. Adanya organisasi tersebut dapat berfungsi dengan baik maka struktur yang telah ditentukan, harus dapat dipenuhi dengan kekuatan personalnya sesuai DSPP seoptimal mungkin, baik kuantitas maupun kualitasnya. Pada Operasi Khusus Kepolisian hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai kedudukan badan keuangan, maka perlu ditentukan kedudukan badan keuangan dalam Struktur Organisasi Operasi Khusus Kepolisian sebagai Sub Komponen dari unsur Banminlog. Dengan demikian penerimaan, penyaluran, penggunaan dan pengendalian serta pertanggung jawaban dana operasi khusus dapat dilaksanakan secara terarah, efektif dan efisien.

### 3) *Pelaksanaan*.

a) Untuk mengatasi kelambatan penerimaan anggaran maka digunakan dana siap pakai dan

diupayakan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

b) UUDP juga dapat digunakan untuk menanggulangi anggaran yang belum diterima terutama terhadap salah satu mata anggaran, untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang menonjol.

c) Dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak diprogramkan sebelumnya, maka dana tambahan dimin-takan ke Kotama berupa cresh program, dan dapat dipenuhi dengan DSP atau dana pengganti/SSB.

d) Peningkatan indeks anggaran disesuaikan dengan kebutuhan realistik di lapangan.

e) Penyaluran anggaran dan dana tepat waktu bersamaan dengan pelaksanaan program.

4) *Pengendalian*. Merupakan suatu proses dari tindakan untuk menjamin agar rencana-rencana, perintah-perintah, petunjuk petunjuk kebijaksanaan ditepati sehingga sasaran dapat dicapai dan dilaksanakan baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan kegiatan Operasi dan pembinaan. Adapun pengendalian terhadap keuangan meliputi :

a) Pengecekan terhadap laporan penerimaan, penyaluran dan pengeluaran anggaran dan dana.

b) Penelitian terhadap administrasi anggaran dan keuangan.



c) Penerbitan peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman pelaksanaan keuangan untuk memudahkan para pelaksana melakukan pekerjaannya.

d) Penempatan personil keuangan yang tepat, mempunyai mental dan disiplin yang dapat diandalkan, karena menyangkut masalah uang.

e) Pengawasan dan pemeriksaan dengan melaksanakan pengecekan langsung kepada para pelaksana terhadap juru bayar minimal satu kali dalam tiga bulan untuk mengetahui apakah pembayaran-pembayaran yang telah dilaksanakan Juru Bayar atas persetujuannya benar-benar sesuai dengan program yang telah ditentukan.

f) Semua pejabat yang terkait dalam mekanisme pengendalian program dan anggaran bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program dan anggaran sehingga mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

g) Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran diadakan :

(1) Peningkatan pengawasan dan pengendalian secara terus menerus.

(2) Meningkatkan *built in control* khususnya pengendalian preventif.

h) Harus dicegah terjadinya penyimpangan prosedur pelaksanaan program dan anggaran

atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## 26. Bidang Sistim Informasi Polri.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pembinaan Sistim Informasi Polri agar mampu mendukung Operasi sehingga dapat mewujudkan keterpaduan Operasional Polri, diarahkan pada peningkatan fungsi-fungsi manajemen daripada empat aspek sistim informasi.

Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan hal tersebut, sebagai berikut :

### a. Bidang Perencanaan.

1) *Sistim dan Metode*. Menyusun ketentuan-ketentuan dan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antar badan-badan pelaksana Sistim Informasi Polri dan penentuan pola dasar (design tunggal) yang komprehensif integral.

2) *Personil*. Menyusun rencana penyiapan tenaga/personil dari segi kuantitas dan kualitas.

3) *Fasilitas*. Menyusun/menyiapkan ketentuan mengenai kualitas sarana dan prasarana serta kesiapan kondisi dan inventarisasi fasilitas.

4) *Data dan informasi*. Penyusunan ketentuan yang jelas mengenai jenis atau macam elemen data maupun jangka waktu yang dapat dijadikan bahan untuk penyusunan data dan informasi serta sistim



jaringan berita sebagai pedoman bagi kesatuan/fungsi pelaksanaan pengguna data.

*b. Pengorganisasian.*

1) *Sistim dan metode.* Menyiapkan/menyusun ketentuan/petunjuk mengenai prosedur dan mekanisme serta wewenang dan tanggung jawab dalam arus data/informasi maupun arus berita secara integratif untuk menghindari adanya pembinaan sistim informasi yang terkotak-kotak.

2) *Personil.* Penentuan jenis/macam keahlian personil harus diatur secara jelas dalam suatu petunjuk sehingga dapat ditentukan struktur kualifikasi personil.

3) *Fasilitas.* Melaksanakan standarisasi dan pengelompokan serta penentuan kualitas/kuantitas, sarana dan prasarana, pemeliharaan, pengendalian inventaris, waktu dan biaya pengadaan dan pemeliharaan fasilitas serta tempat penyimpanannya.

4) *Data dan informasi.* Menyusun pedoman struktur data dan informasi Simin serta tatanan data dan informasi Silops yang terpadu.

*c. Pelaksanaan.*

1) *Sistim dan metode.* Pelaksanaan prosedur, mekanisme, wewenang dan tanggung jawab mengenai pembinaan sistim informasi Polri didasarkan atau merupakan penerapan dari sistim dan metode yang ada sehingga keterpaduan antar fungsi pembinaan maupun Opera-

sional dapat terwujud.

2) *Personil.* Penempatan dan pengawasan personil disesuaikan dengan keahlian dan kemampuannya. Untuk memperoleh keahlian dan kemampuan personil yang diharapkan perlu ditempuh melalui pendidikan dan latihan serta penajaman kurikulum mengenai Sispu-lahjianta.

3) *Fasilitas.* Pembinaan informasi serta kondisi fasilitas diarahkan untuk dapat dimanfaatkan bersama oleh fungsi pembinaan maupun Operasional. Perlu diupayakan pengadaan fasilitas baru untuk mengganti fasilitas saat ini yang kondisinya sudah tua atau rusak dan out of date.

4) *Data dan informasi.* Agar diupayakan penyeragaman format, menyatukan arus informasi dan berita serta pemutakhiran data sehingga data dan informasi dari kesatuan pengguna baik untuk keperluan bidang pembinaan maupun operasional dalam rangka mendukung operasi Kepolisian dapat terlaksana secara maksimal.

*d. Pengawasan dan pengendalian.*

1) Pelaksanaan wasdal terhadap kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan penyelenggaraan dari aspek sistim dan metode, personil, fasilitas serta data dan informasi dilaksanakan secara lebih efektif melalui kunjungan langsung (*on the spot*) dan laporan-



laporan. Hasil kunjungan atau laporan selanjutnya diadakan evaluasi untuk bahan koreksi, perbaikan/pembentukan dan bimbingan guna mewujudkan sistim informasi Polri yang berdaya guna dan berhasil guna.

2) Mengingat kemampuan teknis para pejabat Wasdal terbatas, apabila perlu diikutsertakan personil di luar Polri yang memiliki keahlian di bidang informasi terutama yang memiliki keahlian sebagai analis (komputer) atau keahlian di bidang komlek sehingga diperoleh informasi tentang kelemahan maupun kendala secara akurat di bidang sistim informasi Polri.

## BAB VI PENUTUP

27. Kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa :

a. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri tidak hanya tergantung pada pelaksanaan tugas Operasional Polri, tetapi memerlukan dukungan penyelenggaraan pembinaan sumber daya Polri yang dapat menciptakan keterpaduan dalam kegiatan Operasional Polri untuk menciptakan kondisi Kamtibmas yang mantap.

b. Masih ditemuinya kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pembinaan sumber daya dalam

rangka mendukung kegiatan Operasional Polri, baik dalam tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sangat berpengaruh dalam mewujudkan keterpaduan antara bidang Operasional dengan pembinaan guna mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok Polri.

c. Untuk lebih memberikan peranan yang lebih berarti penyelenggaraan pembinaan sumber daya dalam mendukung Operasi Kepolisian, diperlukan upaya peningkatan yang bersifat komprehensif integral dalam penyelenggaraan pembinaan sumber daya yang meliputi :

- 1) Pembinaan personil, termasuk di dalamnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
- 2) Pembinaan logistik.
- 3) Pembinaan Keuangan/Anggaran.
- 4) Pembinaan Sistim Informasi Polri.

28. Saran. Agar peranan Pembinaan Sumber Daya dalam mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian, sehingga dapat mewujudkan keterpaduan Operasional disarankan :

a. Dalam jangka pendek, mengikutsertakan fungsi pembinaan dalam setiap tahap pelaksanaan Operasi Kepolisian sejak tahap-tahap



awal, sehingga :

- 1) Fungsi pembinaan mampu mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian secara optimal.
- 2) Dapat menimbulkan keterpaduan antara fungsi Operasional dengan fungsi pembinaan dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian.

b. Dalam jangka sedang, dapat segera diwujudkan produk tentang Manajemen Sumber Daya Polri yang akan berguna dalam penyelenggaraan pembinaan Sumber Daya untuk mewujudkan keterpaduan Operasional Polri, sejalan dengan telah disahkannya Manajemen Operasional Polri.

#### DAFTAR NAMA TEAM PERUMUS ANGKATAN

No.	Nama	Pangkat	NRP	
1.	Drs. P.P. Hutauruk	Letkol Pol.	46060017	Ketua diskusi
2.	Herman Rasyid	Letkol Pol	46030007	Moderator
3.	Drs. Sri Soegiarto	Mayor Pol.	52070063	Sekretaris I
4.	Drs. Soesanto Hadi	Mayor Pol.	50070236	Sekretaris II
5.	Drs. Maman Sulaeman	Letkol Pol.	46050058	Pemapar I
6.	Drs. I.W. Wersen Wisesa	Mayor Pol.	49020122	Pemapar II
7.	Kandau D. Walangare	Letkol Pol.	48010136	Anggota
8.	Drs. Pepe Tjahjana	Letkol Pol.	48070197	Anggota
9.	Ahmad Nasif	Letkol Pol.	46030258	Anggota
10.	Drs. Idris	Letkol Pol.	49120331	Anggota
11.	Drs. Moch. Kusnadi	Mayor Pol.	48120210	Anggota
12.	Drs. Muh. Djatmiko	Mayor Pol.	51040131	Anggota
13.	Drs. Doetanto	Mayor Pol.	50090157	Anggota
14.	Drs. Didi Rustadi	Mayor Pol.	50110137	Anggota
15.	Drs. Aris B. Sampoerno	Mayor Pol.	49120348	Anggota
16.	Drs. Herry Syafrudin	Mayor Pol.	52010106	Anggota
17.	Drs. Andi Chaerudin	Mayor Pol.	52090047	Anggota
18.	Drs. Indarto	Mayor Pol.	50090154	Anggota
19.	Drs. I Nyoman Antana	Mayor Pol.	51120125	Anggota

Lembang, Desember 1989

KELAS ANGKATAN  
PRAJA WIRA WICAKSANA